

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana secara etis dan sistematis ketika peserta didik mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga berguna untuk masa depannya. Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Sembilan tahun) dan perwujudan hak azasi manusia, pada tahun 2004 Departemen Pendidikan Nasional melakukan terobosan besar dalam pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan memberi kesempatan dan peluang kepada ABK untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler terdekat. Terobosan tersebut kemudian dikenal dengan program "*Pendidikan Terpadu menuju Pendidikan Inklusif*". Dalam rangka mendukung program tersebut pemerintah menunjuk sekolah reguler dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat tergantung pada banyak faktor. Di tingkat satuan pendidikan, kunci keberhasilan pendidikan inklusif terletak pada kepala sekolah. Dengan demikian, kinerja kepala sekolah sangat penting menjadi perhatian bagi

semua pihak dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif yang lebih baik pada tingkat sekolah.

Melalui pendidikan inklusif diharapkan sekolah – sekolah regular yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif ini dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan layanan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya secara optimal. Oleh karena itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus mereka. Selanjutnya memikirkan cara yang tepat untuk memberikan layanan pendidikan bagi mereka. Sehingga layanan pendidikan yang diberikan semakin meningkat dan bermutu.

Pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah – sekolah yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi masih belum banyak dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini diduga kurangnya bekal pengetahuan dan keterampilan bagaimana melayani anak berkebutuhan khusus.

Selain itu kendala bagi kepala sekolah adalah kebijakan pemerintah yang menunjuk sepihak terhadap sekolah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif tanpa menanyakan dan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sekolah tersebut mampu atau siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kemudian kurangnya sosialisasi yang seharusnya diberikan pemerintah bagi kepala

sekolah mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang baik serta pengetahuan mengenai berbagai kebutuhan bagi anak berkebutuhan khusus.

Agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik sekiranya hal itu harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana, dan aksesibilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhan anak berkebutuhan khusus, ini pun kendala yang didapat ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara ke sekolah – sekolah yang ditunjuk pemerintah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Salah satu cara peningkatan pelayanan pendidikan inklusif adalah dengan memperhatikan harapan kepala sekolah yang terlibat dalam penyelenggara pendidikan tersebut. Dengan memperhatikan harapan kepala sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan dapat dilakukan layanan pendidikan yang sesuai untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tersebut.

Harapan merupakan dasar kepercayaan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dari harapan itu, timbul dorongan yang selanjutnya direalisasikan dengan suatu usaha atau tindakan. Dengan adanya harapan yang tinggi, maka usaha untuk mencapai harapan pun kemungkinan tinggi, begitu juga sebaliknya. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak. Setiap makhluk

hidup memiliki harapan untuk kelangsungan hidupnya. Begitu pula dengan kepala sekolah. Harapan kepala sekolah adalah kepercayaan akan terwujudnya keinginan untuk tujuan dalam memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan keadaan tersebut perlu adanya penelitian mengenai harapan kepala sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk membuktikan meneliti bagaimanakah harapan kepala sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh sekolah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepala sekolah memiliki harapan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya?
2. Apakah kepala sekolah memiliki harapan yang rendah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya?
3. Bagaimana harapan kepala sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jakarta Timur?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka ruang lingkup permasalahan akan dibatasi pada harapan kepala sekolah dalam dorongan dan strategi yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayah Jakarta Timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana harapan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayah Jakarta Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah, diharapkan agar pemerintah memerhatikan aspirasi terutama dari kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga kedepannya dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif yang lebih baik dan sesuai dengan tujuannya.
2. Sekolah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekolah, terutama di wilayah Jakarta Timur terhadap kinerjanya dalam melaksanakan pendidikan inklusif sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik dan dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Peneliti, diharapkan agar dapat menambah wawasan peneliti terkait harapan kepala sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jakarta Timur.
4. Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian sejenis.